



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Jl. Aur No. 1 Telp. (0751) 27206 - 29675 Fax. 29675 Padang
http://www.sumbarprov.go.id e-mail: pol pp@sumbarprov.go.id

Nomor : 332 / 430 / PPUd-PolPP&PK/VI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) hal
Hal : Pengajuan Dokumen Pengangkatan, Mutasi,
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali
serta Kartu Pengenal Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Padang, 25 Juni 2019

Kepada :

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten/Kota
se- Provinsi Sumatera Barat
di-

Tempat

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan hormat diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Semua usulan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib dicatatkan dalam sistem administrasi PPNS secara online.
2. Guna tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan sistem tersebut, setiap dokumen pengajuan diklat, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan format *pdf (Portable Document Format)*, mengingat setiap pengusulan hanya dapat diproses apabila dilampiri dokumen *dalam bentuk softcopy*.
3. Jenis dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan diklat, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS adalah sebagaimana Lampiran II surat ini dan dikirim melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut : ppns.ditjenbak@kemendagri.go.id
4. Khusus untuk pengajuan diklat calon Pejabat PPNS Penegak Perda, pengajuan dokumen harus menyertakan formulir biodata calon peserta diklat, sebagaimana Lampiran I surat ini.
5. Sehubungan hal tersebut dimohon agar ketentuan-ketentuan dimaksud dapat Saudara laksanakan dengan baik dan untuk informasi lebih lanjut dapat dikoordinasikan dengan Subdit PPNS Kementrian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Gedung H Lantai 4 Jakarta Pusat No. Tlp (021) 3450038 ext 18068,18069,18074 Contact Person Sdr. Sopar Lidon Silaban (081310036463) atau Sdr. Saudara Rudi Satria, S.IP (081977546099) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat Telp (0751) 29675.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SUMATERA BARAT


DEDI DIANTOLANI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19721222 199403 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri RI,
2. Bpk. Menteri Hukum dan HAM RI,
3. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.

BIODATA CALON PESERTA DIKLAT PPNS

NAMA :
(lengkap dg gelar depan/belakang)

NIP :

JABATAN :
(teknis operasional)

PANGKAT/GOLONGAN :

AGAMA :

JENIS DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM PENGAJUAN DIKLAT, MUTASI,
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

1. **PENGAJUAN DIKLAT CALON PEJABAT PPNS PENEGAK PERDA**
 - a. Formulir Biodata.
 - b. Petikan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir.
 - c. Keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir.
 - d. Ijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara.
 - e. Surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 - f. Sasaran Kinerja Pegawai beserta lampirannya (daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS) 2 (dua) tahun terakhir.

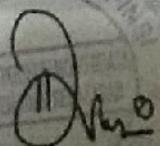
2. **PEMBERHENTIAN**
 - a. Petikan Keputusan pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS.
 - b. Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.

3. **PENGANGKATAN KEMBALI KARENA ALASAN MUTASI**
 - a. Keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS.
 - b. Keputusan mutasi PPNS yang bersangkutan.
 - c. Keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir.
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai beserta lampirannya (daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS) 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.
 - f. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3 X 4 cm (3 lembar)

4. **PENGANGKATAN KEMBALI KARENA ALASAN PENUGASAN KEMBALI SEBAGAI PEJABAT PPNS YANG DIBERHENTIKAN**
 - a. Petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS.
 - b. Keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir.
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai beserta lampirannya (daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS) 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3 X 4 cm (3 lembar).

5. **PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PPNS**
 - a. Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.
 - b. Petikan Keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS.
 - c. Berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
 - d. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3 X 4 cm (3 lembar).

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBARAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT


DEDI DIANTOLANI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19721222 199403 1 002